

## **Kebijakan Pendidikan di Sulawesi Tenggara (Memadu Mutu, Afirmasi, dan Partisipasi)**

**Edy Karno**

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo  
Email: edykarno72@gmail.com

### **Abstrak**

Politik dan pendidikan dapat menyatu dalam sebuah ruang kebijakan pendidikan. Orientasi ideal politik untuk kemaslahatan manusia dapat terjawab melalui perlakuan baik pada pendidikan. Hal ini dibuktikan oleh provinsi Sulawesi Tenggara melalui kebijakan afirmasi dalam bentuk pemberian beasiswa bagi masyarakat berprestasi. Kebijakan ini diwujudkan dalam program Cerdas Sultraku sejak 2011 dibawah komando Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam. Kebijakan ini telah menjembatani ribuan pemuda potensial Sulawesi Tenggara untuk mendapatkan pendidikan, pada jenjang menengah maupun pendidikan tinggi. Tulisan ini hanya meropong implementasi kebijakan ini pada jenjang pendidikan tinggi, yang mencakup empat aspek yakni: kebijakan afirmatif pendidikan di Sulawesi Tenggara; peraturan kendali mutu bagi penerima beasiswa masyarakat berprestasi; kompetensi target bagi penerima beasiswa masyarakat berprestasi; dan keterpakaian lulusan program beasiswa masyarakat berprestasi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, peneliti melakukan pembacaan dokumen dan melakukan wawancara dengan berbagai sumber relevan, untuk mendalami kebijakan pemberian beasiswa masyarakat berprestasi di Sulawesi Tenggara. Melalui proses reduksi, display, dan verifikasi, penelitian menghasilkan temuan-temuan antara lain: *pertama*, kebijakan afirmatif pendidikan di Sulawesi Tenggara didasarkan pada sebuah peraturan gubernur Sulawesi Tenggara; *kedua*, peraturan kendali prestasi ditetapkan dalam sebuah keputusan rektor; *ketiga*, kompetensi target meliputi aspek akademik, penguasaan bahasa asing, akhlak mulia, dan penguasaan IT; *keempat*, keterpakaian lulusan penerima beasiswa masyarakat berprestasi masih rendah, terutama pada instansi-instransi pemerintah, baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

**Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan, Mutu, Afirmasi**

## **Education Policy in Southeast Sulawesi (Mixing Quality, Affirmations, and Participation)**

**Edy Karno**

Faculty of Teacher Training and Education of Halu Oleo University  
Email: edykarno72@gmail.com

### **Abstract**

Politics and education can unite in an educational policy space. The ideal political orientation for human benefit can be answered through good treatment of education. This is evidenced by the province of Southeast Sulawesi through affirmation policy in the form of scholarships for outstanding community. This policy is realized in the "Cerdas Sultraku" program since 2011 under the command of Southeast Sulawesi Governor, Nur Alam. This policy has bridged thousands of potential youths of Southeast Sulawesi to get education, at both middle and higher education levels. This paper only discusses the implementation of this policy at higher education level, which includes four aspects namely: affirmative education policy in Southeast Sulawesi; quality control regulations for awardees of excellent community scholarships; target competencies for awardees of excellent community scholarships; and the application of graduates of excellent scholarship program. Using a qualitative approach and descriptive method, the researcher conducted document readings and conducted interviews with various relevant sources, to explore the scholarship policy of outstanding community in Southeast Sulawesi. Through the process of reduction, display, and verification, the research produced findings such as: *first*, the affirmative education policy in Southeast Sulawesi was based on a governance regulation of Southeast Sulawesi; *second*, the rules of achievement control are defined in a rector's decision; *third*, target competencies include academic aspects, foreign language proficiency, noble character, and mastery of IT; *fourth*, the graduation of graduate recipients of underachievers is still low, especially in government agencies, both provincial and district / city levels.

**Keywords: Education Policy, Quality, Affirmation**

## Pendahuluan

Pendidikan merupakan sarana utama dalam merealisasikan janji-janji kemerdekaan Indonesia, yaitu proses mencerdaskan kehidupan bangsa<sup>1</sup>. Hanya manusia-manusia cerdas yang dapat melakukan peran-peran kebangsaan dan kemanusiaan secara luas, tidak hanya nasional tetapi dalam hubungan antar bangsa. Oleh karena itu, agenda pasca kemerdekaan hingga saat ini memprioritas pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan.

Kesadaran tentang pendidikan semakin merata di kalangan masyarakat, di berbagai belahan dunia. Dalam konteks Indonesia, kesadaran tentang pendidikan juga telah relatif menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Hanya saja, kondisi geografis menyebabkan akses dan pemerataan pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah bangsa ini. Untuk itulah pemerintah telah membuat kebijakan tentang prioritas pembangunan pendidikan pada daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T)<sup>2</sup>.

Selain itu, isu pendidikan semakin menggema di seluruh negeri pada momentum politik, melalui kampanye-kampanye pilkada, pemilihan legislatif hingga pemilihan presiden. Nampaknya, pendulum politik lambat laun mulai mengarah pada pendidikan. Salah satu Propinsi yang merasakan efek dari janji politik pilkada dalam bidang pendidikan adalah Propinsi Sulawesi Tenggara<sup>3</sup>. Dimana terpilihnya Nur Alam sebagai Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara menjadi babak baru dalam pendidikan di Sulawesi Tenggara. Hal ini sangat terasa bagi masyarakat melalui pencanangan Program Cerdas Sultraku<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengungkapkan salah satu usulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni menyelenggarakan pendidikan satu atap dan berasrama, khususnya di Indonesia bagian timur. Ia menyebut rencana itu sudah mulai dilaksanakan oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah juga mendapat bantuan dari Diaspora asal Amerika Serikat (AS) untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Papua. Lihat <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/09/12/ow5pkm-kemendikbud-terus-cari-model-pendidikan-daerah-3t>, diakses 21 Februari 2018

<sup>3</sup> Karno, Edy. "Kualitas Input Program Pendidikan di Sulawesi Tenggara." *Shautut Tarbiyah* 36, no. 23 (2017): 55-72.

<sup>4</sup> Karno, Edy. "Pemerintah Responsif Pendidikan: Kajian Atas" Program Cerdas Sultraku" di Sulawesi Tenggara." *Shautut Tarbiyah* 35, no. 2 (2017): 18-38.

Meskipun demikian, persoalan pendidikan di Sulawesi Tenggara masih memerlukan perhatian yang lebih komprehensif. Program Cerdas Sultraku hanyalah salah satu tonggak kebangkitan pendidikan, yang mesti disusul dengan gerakan-gerakan perbaikan pendidikan lainnya. Diakui bahwa program Cerdas Sultraku telah memberi kesempatan generasi potensial Sulawesi Tenggara dari berbagai Kabupaten/Kota untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Tetapi belum ada evaluasi tentang mutu pendidikan Sulawesi Tenggara dengan adanya program tersebut.

Berarti bahwa program Cerdas Sultraku hanya bersifat rangsangan bagi masyarakat Sulawesi Tenggara dalam meningkatkan level pendidikannya. Belum lagi berbicara tentang kelanjutan program tersebut akibat pergantian periode kepala daerah. Sehingga tulisan ini berupaya mengulas persoalan kebijakan pendidikan di Sulawesi Tenggara dalam konteks:

1. Kebijakan afirmatif pendidikan di Sulawesi Tenggara;
2. Peraturan kendali mutu (prestasi) penerima beasiswa masyarakat berprestasi Sulawesi Tenggara;
3. Kompetensi Target bagi penerima beasiswa masyarakat berprestasi Sulawesi Tenggara;
4. Keterpakaian lulusan penerima beasiswa masyarakat berprestasi Sulawesi Tenggara.

### **Kebijakan Pendidikan: Orientasi Sosial Lembaga Pemerintah**

Institusi pemerintahan lahir sebagai akibat dari konsensus sosial, bahwa perlu adanya wadah yang dapat mengantarkan pencapaian tujuan bersama. Sehingga melalui institusi pemerintahan dirumuskanlah kebijakan-kebijakan yang mengakomodir segala kepentingan masyarakat. Dengan kata lain, sebuah institusi pemerintahan sesungguhnya dilahirkan oleh masyarakat. Karenanya, dimensi utama dari organisasi (apapun) adalah tanggung jawab sosial. Berbagai literatur tentang manajemen selalu mendahulukan pembahasan tentang etika dan tanggung jawab sosial, misalnya Stoner<sup>5</sup>, Robbins<sup>6</sup>, juga Williams<sup>7</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa

---

<sup>5</sup> Stoner, James AF, R. Edward Freeman, and Daniel R. Gilbert. "Management, Fifth Edition." (1992).

<sup>6</sup> Robbins, Stephen P., Mary Coulter, and David De Cenzo. *Fundamentals of Management, Global Edition*. Pearson Education Limited, 2014.

persoalan tanggung jawab sosial merupakan aspek utama dalam penyelenggaraan organisasi. Kajian-kajian tentang tanggung jawab sosial tidak hanya dilakukan pada organisasi profit, tetapi juga pada organisasi nirlaba seperti sekolah, bahkan pesantren<sup>8</sup>.

Kebijakan lahir sebagai bentuk tanggung jawab sosial atau menandakan orientasi sosial sebuah lembaga pemerintahan. Sejalan dengan itu, Muhadjir mengemukakan bahwa kebijakan adalah ikhtiar memecahkan masalah-masalah kemasyarakatan, seperti persoalan keadilan dan kesejahteraan. Karenanya, setiap kebijakan yang diambil mesti menimbang beberapa hal, yaitu:

1. Peningkatan taraf hidup masyarakat;
2. Terwujudnya keadilan dalam hukum dan sosial, termasuk kesempatan dan kreasi individual;
3. Peningkatan partisipasi masyarakat;
4. Jaminan keberlanjutan<sup>9</sup>.

Dengan demikian, kebijakan pendidikan sebagai bagian dari kebijakan publik adalah kebijakan di bidang pendidikan yang mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan nasional<sup>10</sup>. Tujuan pembangunan nasional yaitu "melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial<sup>11</sup>. Kebijakan pendidikan secara lebih strategis dapat dimaknai sebagai pengaturan penyerapan sumber, alokasi dan distribusi sumber, dan pengaturan perilaku pendidikan. Karenanya sebuah kebijakan pendidikan mesti adalah pedoman bertindak dalam ranah pendidikan, yang dirumuskan melalui proses politik, kemudian diturunkan dalam bentuk program-program pendidikan<sup>12</sup>.

---

<sup>7</sup> Williams, Chuck. *Principles of management*. South-Western Cengage Learning, 2013.

<sup>8</sup> Syahrul, Syahrul. "Tanggung Jawab Sosial Pesantren: Studi pada Pondok Pesantren Al Munawwarah Pondidaha, Konawe." *Shautut Tarbiyah* 37, no. 23 (2017): 120-134.

<sup>9</sup> Perhatikan Muhadjir, Noeng. *Perencanaan dan kebijakan pengembangan sumberdaya manusia*. Rake Sarasin, 1992.

<sup>10</sup> Nugroho, Riant. "Kebijakan pendidikan yang unggul." *Yogyakarta: Pustaka Pelajar* (2008).

<sup>11</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>12</sup> Rohman, Arif. "Kebijakan Pendidikan: Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi." *Yogyakarta: Aswaja Pressindo* (2012).

### **Mutu Pendidikan: Upaya Memenuhi Harapan Publik**

Mutu dapat diartikan sebagai kecocokan produk dengan kebutuhan dalam hal desain (*design*), ketersediaan (*availability*), keamanan (*safety*), kesesuaian (*comformance*), dan kegunaan di lapangan (*field use*). Lebih lanjut Juran mengajukan langkah-langkah untuk perbaikan mutu, yaitu: 1) bangun kesadaran akan peluang untuk meningkat; 2) tetapkan tujuan-tujuan perbaikan; 3) pengaturan pencapaian tujuan; 4) berikan pelatihan; 5) Laksanakan proyek pemecahan masalah; 6) laporkan kemajuan; 7) Beri pengakuan; 8) komunikasikan hasil; 9) Simpan skor; dan 10) Pertahankan momentum dengan membuat bagian peningkatan tahunan dari sistem dan proses reguler organisasi<sup>13</sup>. Jika dibawa dalam konteks pendidikan maka layanan ataupun program pendidikan harus didesain agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mampu menjawab persoalan-persoalan mendasar di masyarakat, dan secara praktis dapat diterapkan dalam pemecahan masalah-masalah pendidikan. Langkah-langkah perbaikan mutu harus dipimpin oleh pemerintah melalui kementerian pendidikan, dinas pendidikan propinsi/kabupaten/kota, melalui sosialisasi dalam rangka membangun kesadaran tentang pendidikan bermutu. Selanjutnya adalah menetapkan tujuan-tujuan perbaikan dan menyiapkan personalia sadar mutu melalui pendidikan dan latihan, sehingga mereka siap melaksanakan kegiatan pemecahan masalah. Kemajuan ataupun hambatan mesti diketahui, dan berikan penghargaan atas prestasi, dan pastikan bahwa publik dapat mengetahui hasilnya dalam rangka transparansi.

Mutu pendidikan berkaitan langsung dengan mutu SDM pendidikan, baik pelaksana maupun output. Sehingga mutu pendidikan harus lebih dijabarkan secara detail. Usman mengemukakan 13 karakteristik dari mutu pendidikan sebagai berikut:

1. Kinerja (*performance*) yang berkaitan dengan aspek fungsional sekolah.
2. Waktu wajar (*timelines*) yaitu sesuai dengan waktu yang wajar meliputi memulai dan mengakhiri pelajaran tepat waktu, waktu ulangan tepat.
3. Handal (*reliability*) yaitu usia pelayanan bertahan lama.

---

<sup>13</sup> <https://totalqualitymanagement.wordpress.com/2009/06/07/dr-joseph-juran/>, diakses 21 Februari 2018

4. Data tahan (*durability*) yakni tahan banting, misalnya meskipun krisis moneter, sekolah masih tetap bertahan.
5. Indah (*aesthetics*) misalnya eksterior dan interior sekolah ditata menarik, guru membuat media-media pendidikan yang menarik.
6. Hubungan manusiawi (*personal interface*) yakni menunjung tinggi nilai-nilai moral dan profesionalisme.
7. Mudah penggunaannya (*easy of use*) yakni sarana dan prasarana dipakai.
8. Bentuk khusus (*feature*) yakni keunggulan tertentu misalnya sekolah unggul dalam hal penguasaan teknologi informasi (komputerisasi).
9. Standar tertentu (*conformance to specification*) yakni memenuhi standar tertentu. Misalnya sekolah telah memenuhi standar pelayanan minimal.
10. Konsistensi (*concistency*) yakni keajegan, konstan dan stabil.
11. Seragam (*uniformity*) yakni tanpa variasi, tidak tercampur.
12. Mampu melayani (*serviceability*) yakni mampu memberikan pelayanan prima.
13. Ketepatan (*acuracy*) yakni ketepatan dalam pelayanan<sup>14</sup>.

Sedangkan Indana menyebutkan beberapa prinsip dalam peningkatan mutu pendidikan:

1. Peningkatan mutu pendidikan menuntut kepemimpinan profesional dalam bidang pendidikan.
2. Ketidak mampuan para profesional pendidikan dalam menghadapi kegagalan sistem yang mencegah mereka dari pengembangan atau penerapan cara atau proses baru.
3. Peningkatan mutu pendidikan harus melalui loncatan-loncatan norma dan kepercayaan lama harus dirubah. Sekolah harus belajar bekerjasama dengan sumber-sumber yang terbatas.
4. Uang bukan kunci utama dalam usaha peningkatan mutu. Mutu pendidikan dapat diperbaiki jika administrator, guru, staf, pengawas, dan pimpinan kantor Diknas mengembangkan sikap yang terpusat pada kepemimpinan, teamwork, kerjasama, akuntabilitas dan rekognisi.
5. Kunci utama peningkatan mutu pendidikan adalah komitmen pada perubahan.

---

<sup>14</sup> Usman, Husaini. "Manajemen: Teori." *Praktek, dan Riset Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara* (2009).

6. Para profesional pendidikan yang kurang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam menyiapkan para siswa memasuki pasar kerja yang bersifat global.
7. Program peningkatan mutu dalam bidang komersial tidak dapat dipakai secara langsung dalam pendidikan tetapi membutuhkan penyesuaian penyesuaian dan penyempurnaan.
8. Salah satu komponen kunci dalam program mutu adalah sistem pengukuran program peningkatan mutu pendidikan, baik terhadap siswa, orang tua maupun masyarakat.
9. Masyarakat dan manajemen pendidikan harus menjauhkan diri dari kebiasaan menggunakan “program singkat”, peningkatan mutu dapat dicapai melalui perubahan yang berkelanjutan tidak dengan program singkat<sup>15</sup>.

Dengan kata lain, membangun mutu pendidikan harus ditopang oleh kepemimpinan yang kuat, mampu beradaptasi atas berbagai kondisi lembaga, dan mampu melakukan inovasi-inovasi<sup>16</sup>. Dengan modal demikian, maka suatu organisasi akan terus melakukan perbaikan secara terus menerus atau berkelanjutan (*continuous improvement*)<sup>17</sup>.

#### **Afirmasi Pendidikan : suatu Bentuk Kehadiran Negara**

Memperhatikan paparan tentang mutu pendidikan di atas, terlihat jelas bahwa menghadirkan pendidikan bermutu tidaklah mudah. Wilayah Republik Indonesia yang luas, terdiri dari ribuan pulau diikuti kemajemukan budaya dan ekonomi, memerlukan perhatian lebih dalam pendidikan. Dengan kondisi demikian, maka persoalan mutu akan lebih layak dibicarakan pada daerah-daerah perkotaan, atau paling tidak bukan dalam kategori tertinggal, terluar, terdepan (3T).

---

<sup>15</sup> Indana, Nurul. "Implementasi Total Quality Management (TQM) dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan." *Al-Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2017): 62-86.

<sup>16</sup> Syahrul, Syahrul. "Kepemimpinan dan Inovasi Lembaga Pendidikan (Pengalaman Pondok Gontor VII Putra Sulawesi Tenggara)." *Al-Ta'dib* 8, no. 1 (2015): 82-100.

<sup>17</sup> Syahrul, Syahrul. "Penelitian sebagai Instrumen Perbaikan Kualitas Kinerja Organisasi Pendidikan secara Berkelanjutan (Continuous Improvement)." *Al-Ta'dib* 6, no. 1 (2013): 150-163.

Identifikasi kondisi demografis dan geografis ini melahirkan gagasan tentang perlunya afirmasi di bidang pendidikan. Yaitu suatu bentuk perhatian khusus dari pemerintah atas masyarakat pada daerah-daerah tertentu, yang mengalami beragam hambatan dalam merasakan pendidikan. Program afirmasi ini paling menonjol dilakukan di Papua<sup>18</sup>, meliputi berbagai level pendidikan mulai dari pendidikan menengah<sup>19</sup> hingga pendidikan tinggi<sup>20</sup>, diiringi dengan pemberian beasiswa<sup>21</sup>. Tidak hanya Papua, afirmasi pendidikan juga diberlakukan untuk daerah lain yang layak, sebagaimana dilakukan oleh Universitas Sumatera Utara (USU)<sup>22</sup>.

Propinsi Sulawesi Tenggara juga memiliki siswa yang mendapatkan beasiswa afirmasi pendidikan (ADik) pada 2017, yakni dari kabupaten Konawe dan Bombana<sup>23</sup>. Sedangkan pada tahun 2016 beasiswa afirmasi melalui LPDP diberikan kepada 30 siswa Sulawesi Tenggara yang akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi<sup>24</sup>. Afirmasi pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah propinsi Sulawesi Tenggara dapat dilihat dalam program Cerdas Sultraku, yang memberi kesempatan kepada masyarakat Sulawesi Tenggara untuk meraih akses pendidikan di dalam maupun di luar negeri. Sejak diluncurkan pada 2011, penerima beasiswa Cerdas Sultraku pada jenjang S1 berjumlah 1.037 orang, S2 berjumlah 481 orang, S3 berjumlah 21 orang, dan 91 orang D3<sup>25</sup>.

---

<sup>18</sup> Rivai, Ardian Bakhtiar, and M. M. P. T. Mahasiswa. "Affirmative action: Menebar Cahaya Harapan Untuk Papua." *Diakses dari [http://mmpt.pasca.ugm.ac.id/downloads/8.%20Affirmative%20Action\\_Ardian.pdf](http://mmpt.pasca.ugm.ac.id/downloads/8.%20Affirmative%20Action_Ardian.pdf) pada tanggal 7 (2014).*

<sup>19</sup> Priharsanti, Ajeng. "Aspirasi Pendidikan Siswa Papua di Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Yogyakarta." *Jurnal Riset Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling* 5, no. 11 (2016).

<sup>20</sup> Rivai, Ardian Bakhtiar. "KEBIJAKAN AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI UNTUK PAPUA." *CosmoGov* 1, no. 2 (2017): 266-287.

<sup>21</sup> Siti, Nurhaliza. "Bentuk Interaksi Sosial Mahasiswa Papua Penerima Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik) Selama Mengikuti Perkuliahan Di Universitas Andalas Padang." PhD diss., Universitas Andalas, 2017.

<sup>22</sup> <https://suarausu.co/usu-terima-mahasiswa-afirmasi-dari-luar-papua/> diakses 21 Februari 2018

<sup>23</sup> <http://kampungsultra.com/program-adik-3t-kemenristek-sman-1-asinua-diantaranya/> diakses 21 Februari 2018

<sup>24</sup> <https://sultra.antaranews.com/berita/283487/30-mahasiswa-sultra-peroleh-beasiswa-afirmasi> diakses 21 Februari 2018

<sup>25</sup> <https://sultra.antaranews.com/berita/276928/sultra-gelontorkan-rp16-m-untuk-program-cerdas-sultraku> diakses 21 Februari 2018

### Partisipasi Masyarakat dalam Program Pendidikan

Keterlibatan masyarakat dalam pendidikan menunjukkan kesadaran mereka tentang pentingnya pendidikan. Berbagai kebijakan pendidikan telah dilahirkan, hasilnya cukup menggembirakan pada level PAUD, SD, SMP, dan SMA<sup>26</sup>. Namun hingga saat ini angka partisipasi pendidikan tinggi kita belum mencapai 50%, sebagaimana dinyatakan oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, bahwa APK pendidikan tinggi di Indonesia yang baru mencapai 31,5%<sup>27</sup>. Artinya masih tersisa pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan.

### Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode deksriptif, yaitu melakukan pengkajian pada kondisi alamiah, melakukan deskripsi, dan dikonsultasikan dengan temuan-temuan sebelumnya<sup>28</sup>. Sumber data penelitian meliputi tokoh masyarakat, pejabat dinas pendidikan propinsi Sulawesi Tenggara, para penerima beasiswa Cerdas Sultraku, dan Gubernur Sulawesi Tenggara. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis melalui 4 tahap, yakni: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan<sup>29</sup>. Untuk menjamin keabsahan data maka peneliti melakukan *member check*, triangulasi, perpanjangan pengamatan, dan peningkatan ketekunan<sup>30</sup>.

---

<sup>26</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, *APK/APM PAUD, SD, SMP, SM Tahun 2016/2017 (Termasuk Madrasah dan Sederajat)*, Tahun 2017

<sup>27</sup> <https://ristekdikti.go.id/menteri-nasir-optimis-apk-pendidikan-tinggi-akan-meningkat-pesat-dengan-pjj/> diakses 8 Maret 2018

<sup>28</sup> Bungin, Burhan. *Penelitian kualitatif: komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*. Kencana, 2007.

<sup>29</sup> Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman. "Analisis data kualitatif: Buku sumber tentang metode-metode baru." Jakarta: UI Press (1992).

<sup>30</sup> Moleong, Lexy J. "Metodologi Kualitatif Edisi Revisi." *Bandung: PT. Remaja Rosdakarya* (2005). Lihat juga Sugiyono. *Metode penelitian pendidikan:(pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)*. Alfabeta, 2008.

### **Temuan Penelitian**

Kebijakan pendidikan di Sulawesi Tenggara dalam kurun waktu pelaksanaan program Cerdas Sultraku ditunjang oleh beberapa peraturan, yang dapat dikategorikan menjadi:

1. Kebijakan Afirmatif Pendidikan di Sulawesi Tenggara.
2. Peraturan Kendali Mutu (Prestasi) Penerima Beasiswa Cerdas Sultraku.
3. Kompetensi target bagi penerima beasiswa masyarakat berprestasi Sulawesi Tenggara.
4. Keterpakaian lulusan penerima beasiswa masyarakat berprestasi Sulawesi Tenggara

### **Kebijakan Afirmatif Pendidikan di Sulawesi Tenggara**

Bentuk kehadiran pemerintah atas kondisi pendidikan di Sulawesi Tenggara diwujudkan dalam bentuk Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 55 Tahun 2014 tentang Beasiswa Masyarakat Berprestasi Pemerintah Sulawesi Tenggara pada Universitas Islam Sultan Agung<sup>31</sup>.

Dasar-dasar pertimbangan dalam peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan sebagai konsekwensi otonomi daerah;
2. Tanggung jawab pemerintah daerah dalam membangun Sumber Daya Manusia;
3. Efektifitas dan optimalisasi pemberian bantuan beasiswa pada masyarakat berprestasi<sup>32</sup>.

Adapun tujuan pemberian beasiswa masyarakat berprestasi adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan Sumber Daya Manusia Sulawesi Tenggara yang berkualitas;
2. Meningkatkan motivasi belajar dan prestasi belajar mahasiswa asal Sulawesi Tenggara;

---

<sup>31</sup> Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 55 Tahun 2014 tentang Beasiswa Masyarakat Berprestasi Pemerintah Sulawesi Tenggara pada Universitas Islam Sultan Agung.

<sup>32</sup> Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara, *Ibid*

3. Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi bagi masyarakat Sulawesi Tenggara yang berpotensi akademik tinggi.
4. Menjamin keberlangsungan pendidikan mahasiswa sampai selesai<sup>33</sup>.

Sasaran penerima penerima beasiswa masyarakat berprestasi adalah sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Sulawesi Tenggara dan ditandai dengan KTP dan atau Kartu Keluarga Sulawesi Tenggara;
2. Diutamakan dari masyarakat berprestasi secara akademik;
3. Menunjukkan raport dan ijazah/STTB jenjang pendidikan menengah dengan nilai minimal rata-rata 7 bagi yang melanjutkan ke jenjang DIII dan S1, dan transkrip nilai jenjang pendidikan tinggi atau ijazah dan transkrip akademik dengan IPK minimal 3.0 bagi melanjutkan ke jenjang S2 (Magister);
4. Aktif sebagai mahasiswa yang ditandai dengan Kartu Mahasiswa disertai keterangan Aktif Kuliah dari perguruan tinggi;
5. Mahasiswa yang terdaftar pada perguruan tinggi yang memperoleh izin resmi penyelenggaraan program studi dari pemerintah;
6. Melampirkan foto kopi buku rekening bank aktif dengan nama pemilik yang sama dengan penerima beasiswa sesuai kartu identitas diri;
7. Tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain baik pemerintah (pusat dan daerah), pemerintah negara lain maupun swasta dalam dan luar negeri, ditandai dengan surat bermaterai cukup;
8. Mengisi formulir beasiswa yang disediakan secara *online* atau manual;
9. Lulus mengikuti ujian Tes Potensi Akademik;
10. Melengkapi persyaratan sesuai ketentuan<sup>34</sup>.

Jangka waktu pemberian beasiswa kepada masyarakat berprestasi dihitung sejak dinyatakan aktif sebagai mahasiswa dengan maksimal 6 (enam) semester untuk program Diploma III, 8 (Delapan) semester untuk program Sarjana (S1), dan 4 (empat) semester untuk Program Magister (S2). Beasiswa diberikan pada mahasiswa Diploma Kesehatan, Jenjang S1 dan S2 dengan ketentuan:

---

<sup>33</sup> Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara, *Ibid*

<sup>34</sup> Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara, *Ibid*

1. Mahasiswa yang berasal dari Sulawesi Tenggara pada satuan pendidikan di dalam dan di luar Sulawesi Tenggara;
2. Memiliki indek prestasi semester (IPS) sekurang-kurangnya 3.0 (tiga koma nol) bagi mahasiswa aktif;
3. Memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) 3.0 (tiga koma nol) untuk lulusan sarjana diploma IV yang akan melanjutkan ke jenjang Magister<sup>35</sup>.

Pembiayaan beasiswa masyarakat berprestasi yang menempuh pendidikan di Universitas Islam Sultan Agung bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Penyaluran dana beasiswa dilakukan melalui SKPD terkait setiap semester melalui rekening mahasiswa yang bersangkutan<sup>36</sup>.

Penghentian ataupun pengembalian beasiswa dapat terjadi apabila: 1) Melakukan tindak pidana; 2) Mengundurkan diri; 3) Pindah tempat studi; 4) Dinyatakan drop out; 5) Meninggal dunia. Kecuali meninggal dunia, pelanggaran atas empat point di atas berakibat pada pengembalian dana beasiswa ke kas pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara<sup>37</sup>.

#### **Peraturan Kendali Mutu (Prestasi)**

Sebagai akibat dari kerja sama antara pemerintah Sulawesi Tenggara dengan perguruan tinggi, maka perguruan tinggi tujuan mesti memberi jaminan bahwa para mahasiswa penerima beasiswa Cerdas Sultraku dapat melaksanakan kewajiban akademik dengan baik. Salah satunya adalah pengendalian prestasi mahasiswa melalui Surat Keputusan Rektor Nomor: 2550/A.1/SA/V/2012 tentang tata tertib perkuliahan. Tata tertib ini menggariskan bahwa mahasiswa harus memperoleh IP (*Indeks Prestasi*) di atas 3.00 setiap semester. Jika tidak sesuai dengan ketentuan tersebut maka mahasiswa akan dikelompokkan menjadi Mahasiswa Binaan Khusus.

Capaian mahasiswa yang sesuai dengan ketentuan di atas tentu akan berimbas pada ketepatan waktu dalam penyelesaian studi. Sebaliknya, pengelompokan mahasiswa dalam bentuk binaan khusus akan membutuhkan waktu tambahan sehingga akan menghambat proses penyelesaian studi. Sebagai catatan, tulisan ini belum

---

<sup>35</sup> Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara, *Ibid*

<sup>36</sup> Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara, *Ibid*

<sup>37</sup> Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara, *Ibid*

mengungkap faktor-faktor yang dapat menyebabkan mahasiswa tidak dapat memenuhi standar prestasi sebagaimana dalam peraturan rektor di atas. Gambaran Capaian akademik mahasiswa penerima beasiswa Cerdas Sultraku dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Prestasi Belajar Mahasiswa Penerima Beasiswa Cerdas Sultraku periode 2011-2013

<b>Hasil Studi Mahasiswa</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>TOTAL</b>
IPK > 3	243	420	245	908
IPK 2 -3	191	194	162	547
IPK < 2	40	32	27	99
TOTAL	474	646	434	1.554

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tenggara, 2014

Kondisi di atas menggambarkan capaian akademik mahasiswa penerima beasiswa Cerdas Sultraku sangat bervariasi, dengan deskripsi sebagai berikut:

1. Pada tahun 2011, dari 474 mahasiswa terdapat 243 orang yang memperoleh Indeks Prestasi di atas 3. Sedangkan yang memperoleh Indeks Prestasi 3 ke bawah berjumlah 231 orang. Jika dipersentase maka mahasiswa yang memperoleh Indeks Prestasi di atas 3 adalah sebesar 51.27%. Sedangkan mahasiswa yang memperoleh Indeks Prestasi 3 ke bawah sebesar 48.73%.
2. Pada tahun 2012 terdapat 420 orang yang memperoleh indeks prestasi di atas 3 atau sebesar 65.02%. Sedangkan yang memperoleh indeks prestasi 3 ke bawah berjumlah 226 orang atau sebesar 34.98%.
3. Pada tahun 2013 terdapat 245 orang yang memperoleh indeks prestasi di atas 3 atau sebesar 56.45%. Sedangkan yang memperoleh indeks prestasi 3 ke bawah berjumlah 189 orang atau sebesar 43.55%.

Hal ini menunjukkan bahwa capaian akademik mahasiswa penerima beasiswa Cerdas Sultraku sangat fluktuatif. Angkatan 2011 yang mencapai angka 51 persen ditingkatkan oleh angkatan 2012 yang mencapai angka 65 persen. Tetapi mengalami penurunan prestasi pada angkatan 2013 yang berada pada angka 56 persen. Selain itu,

persentase mahasiswa yang menjadi binaan khusus patut menjadi perhatian, yang jika dibuat angka rata-rata mencapai 41.67%. Catatan atas temuan ini adalah tentang efektifitas peraturan rektor tentang kendali prestasi akademik dan pembiayaan tambahan yang harus dialokasi oleh pemerintah daerah bagi mahasiswa binaan khusus.

### **Kompetensi Target bagi Penerima Beasiswa Masyarakat Berprestasi Sulawesi Tenggara**

Kompetensi yang diharapkan dari mahasiswa yang mendapatkan beasiswa masyarakat berprestasi meliputi kompetensi akademik yang ditunjukkan dengan raihan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) di atas 3.00. Kompetensi lainnya adalah kemampuan berbahasa asing, IT Literacy dan penanaman budaya akademik Islami yaitu menciptakan generasi *khaira ummah*<sup>38</sup>. Penetapan kompetensi ini berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 0903/D.3/SA/II/2012<sup>39</sup>.

Keterangan pihak UNISSULA melalui *ambassador* dan alumnus peserta Program Cerdas Sultraku menegaskan bahwa umumnya selesai dengan tepat waktu. Selain itu peserta diharuskan selesai dengan mempunyai pemahaman mengenai baca tulis dan khatam Al'Quran, penguasaan bahasa asing dan implementasi *Cyber Culture*. Kegiatan penunjang pencapaian kompetensi antara lain dengan capaian TOEFL minimal 450, Baca Tulis dan Khatam Al'Quran, dan mahir dalam penguasaan Ilmu Teknologi.

### **Keterpakaian Lulusan Program Beasiswa Masyarakat Berprestasi**

Selain meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan, lulusan program Cerdas Sultraku diharapkan memberi dampak baik bagi masyarakat dengan mengisi

---

<sup>38</sup> Lihat Karno, Edy. "Kualitas Input Program Pendidikan di Sulawesi Tenggara." *Shautut Tarbiyah* 36, no. 23 (2017): 55-72

<sup>39</sup> Surat Keputusan Rektor Nomor: 0903/D.3/SA/II/2012 yang menetapkan bahwa penggunaan dan pemanfaatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tenggara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara adalah untuk: 1) Mendapatkan IPK 3.00; 2) Peningkatan pemahaman BudAi (Baca Tulis dan khatam Al'Quran); 3) Penguasaan bahasa asing dengan TOEFL minimal 450; dan Implementasi *Cyber Culture* bagi mahasiswa UNISSULA. Lihat Karno, Edy. "Kualitas Input Program Pendidikan di Sulawesi Tenggara." *Shautut Tarbiyah* 36, no. 23 (2017): 55-72

angkatan kerja. Hal ini menjadi harapan dari pemerintah sebagai pemberi bantuan pendidikan. Kelemahannya adalah tidak adanya kontrak kerja yang diberikan oleh pemerintah kepada para penerima beasiswa masyarakat berprestasi. Harapan ini juga lebih tinggi lagi pada masyarakat yang mana anak mereka menjadi bagian dari penerima beasiswa masyarakat berprestasi. Bahwa pendidikan yang telah ditempuh harus memberi manfaat bagi kemajuan daerah mereka.

### **Penutup**

Kebijakan di bidang pendidikan menandakan adanya tanggung jawab dan orientasi sosial dari pemerintah. Kehadiran pemimpin yang berpihak bagi kepentingan masyarakat sangat menentukan bagi lahirnya sebuah kebijakan pendidikan. Dalam praktiknya, Provinsi Sulawesi Tenggara telah membuat langkah maju dalam kebijakan pendidikan di daerah dalam bentuk pemberian beasiswa masyarakat berprestasi, yang terbungkus dalam program Cerdas Sultraku. Program ini telah menjembatani berbagai kalangan masyarakat di Sulawesi Tenggara untuk mendapatkan akses pada pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi. Sebagai gerakan baru, dengan periode pemerintahan yang terbatas, program Cerdas Sultraku tentu memiliki kelemahan pada beberapa aspek. Salah satunya tentang keterpakaian lulusan penerima beasiswa masyarakat berprestasi. Sebagai sebuah kebijakan yang berdimensi universal, hal ini patut dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya, dengan perbaikan-perbaikan dan terobosan baru.

### Daftar Pustaka

- Bungin, Burhan. *Penelitian kualitatif: komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*. Kencana, 2007
- <https://ristekdikti.go.id/menteri-nasir-optimis-apk-pendidikan-tinggi-akan-meningkat-pesat-dengan-pjj/> diakses 8 Maret 2018
- <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/09/12/ow5pkm-kemendikbud-terus-cari-model-pendidikan-daerah-3t>,
- <https://totalqualitymanagement.wordpress.com/2009/06/07/dr-joseph-juran/>, diakses 21 Februari 2018
- <https://suarausu.co/usu-terima-mahasiswa-afirmasi-dari-luar-papua/> diakses 21 Februari 2018
- <http://kampungsultra.com/program-adik-3t-kemenristek-sman-1-asinua-diantaranya/> diakses 21 Februari 2018
- <https://sultra.antaranews.com/berita/283487/30-mahasiswa-sultra-peroleh-beasiswa-afirmasi> diakses 21 Februari 2018
- <https://sultra.antaranews.com/berita/276928/sultra-gelontorkan-rp16-m-untuk-program-cerdas-sultraku>, diakses 21 Februari 2018
- Indana, Nurul. "Implementasi Total Quality Management (TQM) dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan." *Al-Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2017)
- Karno, Edy. "Pemerintah Responsif Pendidikan: Kajian Atas" Program Cerdas Sultraku" di Sulawesi Tenggara." *Shautut Tarbiyah* 35, no. 2 (2017)
- Karno, Edy. "Kualitas Input Program Pendidikan di Sulawesi Tenggara." *Shautut Tarbiyah* 36, no. 23 (2017)
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, *APK/APM PAUD, SD, SMP, SM Tahun 2016/2017 (Termasuk Madrasah dan Sederajat)*, Tahun 2017
- Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman. "Analisis data kualitatif: Buku sumber tentang metode-metode baru." Jakarta: UI Press (1992)
- Moleong, Lexy J. "Metodologi Kualitatif Edisi Revisi." *Bandung: PT. Remaja Rosdakarya* (2005).
- Muhadjir, Noeng. *Perencanaan dan kebijakan pengembangan sumberdaya manusia*. Rake Sarasin, 1992.
- Nugroho, Riant. "Kebijakan pendidikan yang unggul." *Yogyakarta: Pustaka Pelajar* (2008).

- Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 55 Tahun 2014 tentang Beasiswa Masyarakat Berprestasi Pemerintah Sulawesi Tenggara pada Universitas Islam Sultan Agung.
- Priharsanti, Ajeng. "Aspirasi Pendidikan Siswa Papua di Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Yogyakarta." *Jurnal Riset Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling* 5, no. 11 (2016).
- Rivai, Ardian Bakhtiar. "Kebijakan Afiriasi Pendidikan Tinggi Untuk Papua." *CosmoGov* 1, no. 2 (2017)
- Rivai, Ardian Bakhtiar, and M. M. P. T. Mahasiswa. "Affirmative action: Menebar Cahaya Harapan Untuk Papua." *Diaskes dari [http://mmpt.pasca.ugm.ac.id/downloads/8.%20Affirmative%20Action\\_Ardian.pdf](http://mmpt.pasca.ugm.ac.id/downloads/8.%20Affirmative%20Action_Ardian.pdf) pada tanggal 7* (2014).
- Robbins, Stephen P., Mary Coulter, and David De Cenzo. *Fundamentals of Management, Global Edition*. Pearson Education Limited, 2014.
- Rohman, Arif. "Kebijakan Pendidikan: Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi." *Yogyakarta: Aswaja Pressindo* (2012).
- Siti, Nurhaliza. "Bentuk Interaksi Sosial Mahasiswa Papua Penerima Beasiswa Afiriasi Pendidikan Tinggi (ADik) Selama Mengikuti Perkuliahan Di Universitas Andalas Padang." PhD diss., Universitas Andalas, 2017.
- Stoner, James AF, R. Edward Freeman, and Daniel R. Gilbert. "Management, Fith Edition." (1992).
- Sugiyono. *Metode penelitian pendidikan:(pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)*. Alfabeta, 2008
- Syahrul, Syahrul. "Tanggung Jawab Sosial Pesantren: Studi pada Pondok Pesantren Al Munawwarah Pondidaha, Konawe." *Shautut Tarbiyah* 37, no. 23 (2017)
- Syahrul, Syahrul. "Kepemimpinan dan Inovasi Lembaga Pendidikan (Pengalaman Pondok Gontor VII Putra Sulawesi Tenggara)." *Al-Ta'dib* 8, no. 1 (2015)
- Syahrul, Syahrul. "Penelitian sebagai Instrumen Perbaikan Kualitas Kinerja Organisasi Pendidikan secara Berkelanjutan (Continuous Improvement)." *Al-Ta'dib* 6, no. 1 (2013)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Usman, Husaini. "Manajemen: Teori." *Praktek, dan Riset Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara* (2009).